



Implementasi Kebijakan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) Studi Kasus Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara.

Ni Made Satya Harthamia *

Ni Putu Anik Prabawati

I Dewa Ayu Putri Wirantari

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Correspondence: * satyaharthamia@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the implementation of the Social Welfare Information System - Next Generation (SIKS-NG) application policy in Pemecutan Kaja Village, North Denpasar District. The research uses a descriptive qualitative method with a case study approach. The focus of the research examines how the SIKS-NG application is utilized in managing data on social assistance recipients and efforts to improve the accuracy of poverty data based on Ministry of Social Affairs Regulation Number 3 of 2021 concerning Integrated Social Welfare Data Management. The results show that the implementation of the SIKS-NG application in Pemecutan Kaja Village is running well and provides convenience in managing social welfare data. However, there are a number of obstacles such as the lack of staff technological knowledge, the mismatch of population data (NIK) with Dukcapil data, and the lack of socialization to the community, which causes the process of submitting and verifying DTKS data to not be fully effective and optimal. Recommendations include increasing the capacity of human resources and optimizing technology facilities so that the system can run more effectively and on target. This research is expected to contribute to policy development and the application of technology in social services.

Keywords: Policy Implementation, Social Welfare Information System - Next Generation (SIKS-NG), Integrated Social Welfare Data (DTKS), Pemecutan Kaja Village.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) di Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Fokus penelitian mengkaji bagaimana aplikasi SIKS-NG dimanfaatkan dalam pengelolaan data penerima bantuan sosial serta upaya meningkatkan akurasi data kemiskinan berdasarkan Peraturan Kementerian Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SIKS-NG di Desa Pemecutan Kaja berjalan dengan baik dan memberikan kemudahan dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial. Namun, terdapat sejumlah kendala seperti kurangnya pengetahuan teknologi staf, ketidaksesuaian data penduduk (NIK) dengan data Dukcapil, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, yang menyebabkan proses pengajuan dan verifikasi data DTKS belum sepenuhnya efektif dan optimal. Rekomendasi yang diberikan meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan optimalisasi fasilitas teknologi agar sistem dapat berjalan secara lebih efektif dan tepat sasaran. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan penerapan teknologi dalam pelayanan sosial.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Desa Pemecutan Kaja

I. Pendahuluan

Kemiskinan adalah persoalan yang rumit dan dihadapi oleh banyak negara, khususnya negara-negara berkembang seperti Indonesia. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan kekurangan pendapatan

atau uang, tetapi juga meliputi keterbatasan akses terhadap kebutuhan pokok seperti layanan kesehatan, pendidikan, modal usaha, sanitasi, serta kebutuhan sosial yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang layak. Kemiskinan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jumlah penduduk yang tinggi, yang dapat menyebabkan pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan. Kemiskinan adalah masalah utama yang ada dalam kehidupan masyarakat dan menjadi penyebab utama masalah sosial lainnya. Sebagai upaya mengatasi kemiskinan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Undang-undang ini dibuat sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memelihara fakir miskin agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

Implementasi kebijakan undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 sangat penting karena menjadi tahap penentu dalam mewujudkan tujuan kebijakan, menghubungkan rencana dengan realita. Tanpa implementasi yang efektif, kebijakan hanya akan menjadi rencana tanpa dampak nyata. Implementasi merupakan sebuah hasil atau proses yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan dilihat dari *output* atau pencapaian tujuan akhir apakah telah belum tercapai atau sudah tercapai (Agustino, 2017:139). Pelaksanaan dapat dilakukan dengan cepat pada saat-saat tertentu, namun seringkali membutuhkan waktu menunggu karena perlunya perencanaan yang teliti. Isu kemiskinan tetap menjadi persoalan yang signifikan bagi negara maju dan negara berkembang. Kemajuan teknologi berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan, baik di negara maju maupun berkembang. Inovasi digital seperti fintech dan sistem biometrik meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial, memungkinkan masyarakat miskin mengakses bantuan dengan lebih mudah

Gambar 1.1 Aplikasi SIKS-NG



(Sumber: Dinas Sosial Kota Denpasar, 2024)

Aplikasi SIKS-NG, dikenal juga dengan sebutan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation, merupakan perubahan dari aplikasi sebelumnya yang bernama SIKS. Aplikasi SIKS dimulai dari tahun 2015 kemudian bertransformasi pada tahun 2017 menjadi aplikasi SIKS-NG. Dengan fitur-fitur baru dan teknologi yang lebih canggih, SIKS-NG berpotensi besar untuk meningkatkan efektivitas program-program sosial dan memberikan data yang lebih akurat untuk penanggulangan kemiskinan. SIKS lebih fokus pada penyajian informasi bagi masyarakat umum mengenai status penerimaan bantuan sosial, sedangkan SIKS-NG dirancang untuk pengelolaan data yang lebih mendalam dan digunakan oleh petugas untuk memastikan akurasi dan kelayakan penerima bantuan. SIKS-NG juga memiliki kemampuan untuk melacak riwayat kepesertaan, yang tidak dimiliki oleh SIKS, menjadikannya alat yang lebih canggih dalam manajemen data sosial.

Undang-undang nomor 13 tahun 2011 yang membahas penanganan fakir miskin sangat berkaitan dengan penerapan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation (SIKS-NG) dalam mengelola atau manajemen data kesejahteraan sosial di Indonesia. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, atau dikenal dengan sebutan SIKS-NG, adalah suatu aplikasi nasional yang telah dirancang oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk meningkatkan ketepatan atau

akurasi dan kesatuan data tentang kemiskinan. Fokus utama dari aplikasi ini adalah untuk menciptakan basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang akurat dan selalu diperbarui, dengan tujuan mendukung langkah-langkah dalam mengatasi kemiskinan serta menyelaraskan pendistribusian bantuan sosial secara lebih efisien. Penjelasan mengenai pedoman umum dalam melakukan verifikasi dan validasi data terpadu untuk membantu masyarakat kurang mampu di Indonesia dapat ditemukan dalam Peraturan Kementerian Sosial Nomor 3 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan data-data yang dikelola terstruktur dengan baik dan berkelanjutan dalam rangka melaksanakan program kesejahteraan sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017. Dalam Peraturan Nomor 3 Tahun 2021, terdapat penekanan pada keperluan mengelola data secara teratur dan berkesinambungan, mulai dari proses usulan data, verifikasi, validasi, hingga penggunaannya untuk memastikan kemudahan akses atau aksesibilitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Selain itu, Peraturan Nomor 3 Tahun 2021 mencabut beberapa peraturan sebelumnya, termasuk Peraturan Nomor 28 Tahun 2017 dan Peraturan Nomor 5 Tahun 2019, sehingga memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan terintegrasi untuk pengelolaan DTKS. Oleh karena itu, peraturan terbaru ini dibuat untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam penyaluran bantuan sosial kepada mereka yang membutuhkan, sambil memastikan keakuratan dan keandalan data yang digunakan.

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) di Kota Denpasar dimulai dengan inisiatif pemerintah Kota Denpasar untuk mengadopsi teknologi informasi dalam pengelolaan dan penyediaan layanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Pemerintah Kota Denpasar mengidentifikasi kebutuhan untuk meningkatkan sistem manajemen kesejahteraan sosial yang ada. Ini termasuk kebutuhan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesejahteraan sosial, mempercepat proses pengajuan dan penyediaan bantuan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kesejahteraan sosial.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa) Periode Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa)		
	2021	2022	2023
Kab. Jembrana	14,24	15,00	14,12
Kab. Tabanan	23,11	23,46	21,42
Kab. Badung	18,52	18,28	17,01
Kab. Gianyar	25,36	24,74	23,76
Kab. Klungkung	10,19	10,89	10,22
Kab. Bangli	11,68	12,17	12,24
Kab. Karangasem	28,52	29,45	27,83
Kab. Buleleng	40,92	41,68	39,52
Kota Denpasar	29,41	30,02	27,69
Provinsi Bali	201,97	205,68	193,78

(Sumber: BPS Provinsi Bali, 2023)

Pada Tabel 1 Kota Denpasar menduduki peringkat ke-3 kemiskinan perkotaan dengan jumlah penduduk miskin setelah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem. Kabupaten Denpasar memiliki jumlah kemiskinan yang besar walaupun Kota Denpasar merupakan ibu kota Provinsi Bali. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk perbedaan dalam distribusi pendapatan, akses terhadap pekerjaan, dan infrastruktur sosial di wilayah tersebut. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial di tingkat kabupaten untuk memastikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Bali dan berbagai lembaga terkait telah mengembangkan berbagai program dan aplikasi untuk membantu

mengurangi kemiskinan. Salah satu aplikasi yang dikembangkan adalah SIKS-NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial yang dimulai pada tahun 2017. Namun pemerintah kota Denpasar mulai aktif menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) pada tahun 2019.

Sebelum diterapkannya Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, pemerintah desa, khususnya Kota Denpasar, mengandalkan cara manual dalam pendataan bantuan sosial. Hal ini melibatkan individu yang mendaftarkan diri di Desa/Kelurahan atau mengajukan usulan melalui RT/RW ke Desa/Kelurahan. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa individu dapat dimasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki informasi identitas yang akurat dan sesuai dengan status hukumnya. Hal ini juga bertujuan untuk mengklasifikasikan mereka sebagai bagian dari kelompok keluarga miskin dan memungkinkan mereka untuk direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Desa/Kelurahan. Selanjutnya, Pemerintah Desa akan menyerahkan data tersebut kepada instansi pemerintah terkait. Namun pendekatan manual yang melibatkan proses pelaporan bantuan sosial yang panjang ini rentan terhadap berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain adanya duplikat data, pencantuman individu yang meninggal dalam pencatatan, pemberian bantuan kepada individu yang mampu secara finansial, dan permasalahan serupa lainnya. Dengan mempertimbangkan hal ini, pendekatan pengumpulan data kesejahteraan sosial di Indonesia yang komprehensif dan terpadu harus diupayakan dan dilaksanakan secara sistematis. Optimismenya, dengan sistem Aplikasi SIKS-NG, statistik kesejahteraan sosial akan akurat dan tepat sasaran.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara menyeluruh melalui data yang bersifat deskriptif, baik berupa kata-kata tertulis maupun lisan serta perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2014). Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu menggambarkan proses implementasi kebijakan secara menyeluruh serta dampaknya terhadap masyarakat penerima manfaat program kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, metode kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menyajikan dan menjelaskan proses sosial secara mendalam, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan aplikasi SIKS-NG di lingkungan masyarakat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung terhadap informan yang relevan, seperti Manajer SLRT Dinas Sosial Kota Denpasar, fasilitator desa, serta masyarakat penerima dan non-penerima manfaat. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen tertulis, termasuk buku, artikel, jurnal, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan kesejahteraan sosial dan implementasi SIKS-NG (Sugiyono, 2017). Lokasi penelitian ditetapkan di Dinas Sosial Kota Denpasar, karena institusi ini memiliki tanggung jawab langsung terhadap implementasi program kesejahteraan sosial dan dianggap mampu memberikan informasi teknis maupun administratif yang dibutuhkan peneliti (Darmadi, 2011).

Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan khusus atas relevansi dan pemahaman mendalam yang dimiliki oleh individu terhadap objek penelitian (Moleong, 2014). Informan kunci meliputi pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, seperti manajer SLRT dan fasilitator desa, serta masyarakat sebagai penerima dan pengamat dampak dari aplikasi SIKS-NG. Kombinasi dari berbagai jenis informan ini memberikan sudut pandang yang luas dan mendalam mengenai keberhasilan maupun tantangan dalam penerapan kebijakan tersebut.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan menggali

informasi mendalam mengenai persepsi, pengalaman, dan penilaian informan terhadap implementasi SIKS-NG (Sugiyono, 2017). Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung proses yang berlangsung di lapangan, khususnya dalam interaksi antara sistem dengan masyarakat (Moleong, 2014). Dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap data, yang berasal dari dokumen resmi, arsip, dan laporan terkait program kesejahteraan sosial.

Tahapan analisis data dilakukan berdasarkan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2015). Reduksi data merupakan proses menyaring dan menyederhanakan informasi yang relevan, penyajian data dilakukan dengan cara yang sistematis agar memudahkan penarikan makna, sementara verifikasi adalah proses reflektif yang terus-menerus dilakukan untuk memastikan kesimpulan yang diambil benar-benar mencerminkan realitas yang ditemukan.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil temuan Penelitian

Terdapat tiga indikator utama yang dianalisis untuk menilai implementasi kebijakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG), yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Pada indikator organisasi, temuan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh tiga aspek penting: sumber daya manusia, struktur unit organisasi, dan metode teknis. Sumber daya manusia di Dinas Sosial Kota Denpasar dan Kantor Desa Pemecutan Kaja dinilai sudah memadai, baik dari segi jumlah maupun kualifikasi, karena sebagian besar pegawai berpendidikan sarjana dan telah direkrut sesuai bidang keahlian. Namun demikian, pelatihan lanjutan tetap dibutuhkan agar para staf dapat mengoperasikan aplikasi dengan lebih optimal. Dari sisi struktur unit, baik Dinas Sosial maupun Desa Pemecutan Kaja telah memiliki organisasi yang lengkap dan terstruktur, di mana tugas dan wewenang setiap pegawai jelas terdefinisi. Program SIKS-NG dikelola oleh Bidang Penanganan Fakir Miskin di tingkat kota dan fasilitator desa di tingkat desa. Koordinasi antar unit menjadi perhatian penting, karena sinergi antar bagian menentukan kelancaran alur data dan pelayanan. Untuk metode teknis, pelaksanaan SIKS-NG dilakukan melalui sosialisasi dan sensus penduduk, dan informasi mengenai penerima bantuan juga disebarluaskan melalui grup WhatsApp banjar sebagai media komunikasi komunitas.

Pada indikator interpretasi, meskipun implementasi aplikasi telah berjalan, terdapat hambatan dalam pemahaman dan pelaksanaan kebijakan. Salah satu kendala utama adalah ketidaksesuaian data dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), seperti nomor induk kependudukan (NIK) yang tidak valid, yang menunjukkan lemahnya pemaknaan terhadap kriteria penerima bantuan. Selain itu, kurangnya sosialisasi kebijakan secara berkelanjutan menyebabkan banyak warga tidak memahami mekanisme pengajuan, sehingga mereka yang tidak memenuhi syarat tetap mengajukan permohonan bantuan.

Indikator ketiga yaitu aplikasi, juga menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan aplikasi SIKS-NG berjalan, berbagai tantangan teknis masih dihadapi di lapangan. Gangguan jaringan internet menjadi salah satu hambatan terbesar, karena ketidakstabilan koneksi mengakibatkan aplikasi sulit diakses, yang berdampak pada lambatnya proses input dan pengolahan data. Selain itu, masalah ketidaksesuaian data Kartu Keluarga (KK) juga muncul akibat kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperbarui data kependudukan di Disdukcapil, sehingga banyak data yang tidak terdaftar dan menyulitkan dalam proses validasi calon penerima bantuan. Ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur pendaftaran, termasuk pengisian kuesioner, turut menambah kompleksitas permasalahan. Faktor eksternal seperti pelaksanaan pemilu juga dapat mengganggu proses penyaluran bantuan sosial, karena kegiatan politik tersebut memengaruhi waktu distribusi dan prioritas kegiatan di lapangan. Secara keseluruhan, meskipun aplikasi SIKS-NG sudah diimplementasikan dengan cukup

baik, berbagai tantangan administratif, teknis, dan sosial tetap perlu diatasi agar tujuan dari kebijakan ini dapat tercapai secara optimal.

3.2 Analisis Hasil Temuan

3.2.1 Keterkaitan Teori dengan Implementasi Kebijakan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation dalam Mengatasi Kemiskinan di Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat hasil analisis temuan Implementasi Program Aplikasi SIKS-NG dalam mengatasi kemiskinan di Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara yang menggunakan tiga indikator implementasi program yang dikemukakan oleh Charles O. Jones yakni: organisasi; interpretasi atau pemahaman, serta penerapan atau aplikasi yang mempengaruhi kepada hasil keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program aplikasi SIKS-NG oleh Dinas Sosial Kota Denpasar di Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara.

1. Organisasi

Organisasi adalah faktor keberhasilan untuk menjalankan sebuah program. Di dalam organisasi terdapat sumber daya, unit/infrastruktur, serta metode untuk menjalankan sebuah kebijakan atau pelaksanaan program. Tidak semua organisasi harus melakukan pembentukan atau penata ulang kembali organisasi tersebut, apabila sebuah program atau kebijakan tidak berhasil untuk diimplementasikan maka hal ini dapat dikoordinasikan oleh organisasi tersebut. Dimana organisasi menjadi pelaksana dalam sebuah kebijakan sebuah program yang nantinya pemerintah mengetahui apakah program ini dapat berjalan. Dinas Sosial Kota Denpasar dan fasilitator desa pemecutan kaja memiliki organisasi atau tim sendiri sebagai pelaksana dalam program Aplikasi SIKS-NG. Dari indikator organisasi sendiri terdapat beberapa sub indikator sebagai penilaian bahwa program Aplikasi SIKS-NG ini berhasil di Implementasikan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar yaitu sebagai berikut.

Pertama, sumber daya yang menjadi kebijakan wajib membantu pelaksana untuk mengimplementasikan sebuah program. Apabila pemerintah tidak menyiapkan rancangan yang matang akan menutup kemungkinan bahwa implementasi program tersebut tidak berhasil diterapkan. Sumber daya yang diperlukan untuk implementasi program aplikasi SIKS-NG yaitu pegawai/staf yang merancang program mulai dari pembuatan, pemrosesan, serta pengelolaan program, tim teknis, tim pejabat penghubung, serta admin yang tersedia di setiap instansi.

Diketahui berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan bahwa Dinas Sosial Kota Denpasar dan Kantor Desa Pemecutan Kaja mempunyai sumber daya dengan kategori sudah cukup memadai atau lengkap. Dikatakan demikian karena program aplikasi SIKS-NG sendiri telah berhasil diimplementasikan sebagai pelayanan dalam menyalurkan bantuan untuk masyarakat kurang mampu hingga saat ini. Yang dimana berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa kualitas pegawai selaku sumber daya manusia Dinas Sosial Kota Denpasar dan Kantor Desa Pemecutan Kaja Komunikasi, yang mana dalam mengelola aplikasi SIKS-NG dikelola oleh Bidang Penanganan Fakir Miskin dan di bantu oleh Fasilitator Desa Pemecutan Kaja.

Kedua, unit atau struktur organisasi yaitu mekanisme formal atau tatanan kerangka serta susunan penerapan pola tetap hubungan antara fungsi, bagian atau posisi, maupun orang yang menunjukkan kedudukan, wewenang serta tanggung jawab dari suatu organisasi. Tujuannya sebagai pengorganisir serta pendistribusian tugas yakni agar berjalan serta mencapai tujuan serta sasaran organisasi. Berdasarkan temuan di lapangan, unit atau struktur organisasi pada Dinas Sosial Kota Denpasar dan Kantor Desa Pemecutan Kaja telah memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, mereka mampu menjalankan peran serta tanggung jawabnya secara efektif dalam mengelola program aplikasi SIKS-NG sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki.

Ketiga, metode merupakan rangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan berbagai sumber daya serta mempengaruhi hasil dari proses manajemen, dengan memperhatikan fungsi dan dinamika organisasi atau birokrasi demi mencapai tujuan yang sah. Dengan adanya metode yang terstruktur, suatu organisasi akan lebih mudah dan teratur dalam mewujudkan tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, metode yang diterapkan oleh Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Denpasar dan Fasilitator Desa Pemecutan Kaja meliputi pelaksanaan sensus penduduk serta sosialisasi kepada masyarakat kurang mampu. Namun, hasil di lapangan bahwa belum semua masyarakat kurang mampu menerima penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar dan perangkat desa sehingga mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui alur pendaftaran dan hal yang perlu dipenuhi untuk mendaftar DTKS pada Aplikasi SIKS-NG. Kenyataannya apabila aparat yang bertugas memiliki hambatan pada saat input data masyarakat masih sering terjadi ketidakcocokan NIK. Apabila masyarakat melakukan pendaftaran masih ada beberapa persyaratan yang belum dilengkapi seperti mengisi kuesioner. Apabila terjadi sesuatu atau ingin menyampaikan informasi terkait kuota pendaftaran dan siapa saja masyarakat yang menerima bantuan, mereka menggunakan kanal media sosial berupa grup whatsapp masing-masing banjar yang ada di Desa Pemecutan Kaja.

Berdasarkan Teori Kebijakan Publik pada Indikator Implementasi Program yaitu organisasi pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut disebabkan yaitu Dinas Sosial Kota Denpasar dan Desa Pemecutan Kaja memiliki sumber daya manusia yang cukup terpenuhi dengan kualifikasi yang baik. Sedangkan unit Dinas Sosial Kota Denpasar cukup terpenuhi dalam mengelola Aplikasi SIKS-NG dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat kurang mampu memiliki kemampuan yang baik. Untuk metode sosialisasi dapat dikatakan belum optimal dalam melakukan metode sosialisas mengenai layanan Aplikasi SIKS-NG. Karena terdapat masyarakat yang tidak mengetahui sama sekali dengan adanya program SIKS-NG dan cara melakukan pendaftaran. Sosialisasi yang seharusnya dilakukan dengan secara berkala dan rutin serta dilakukan pengawasan atau memberikan survei pelayanan kepuasan masyarakat mengenai layangan Aplikasi SIKS-NG.

2. Interpretasi

Pemahaman atau interpretasi juga menjadi faktor keberhasilan dalam pelaksanaan program aplikasi SIKS-NG karena adanya pemahaman dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan suatu implementasi. Pemerintah yang menerapkan keputusan atau kebijakan wajib memahami tindakan yang akan dilakukan. Dimana suatu kebijakan tersebut dilakukan dengan tepat sesuai arahan serta petunjuk pelaksana. Berkaitan dengan interpretasi atau pemahaman yang ingin dilihat apakah implementasi program Aplikasi SIKS-NG di Desa Pemecutan Kaja yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Denpasar dan di dampingi oleh Fasilitator Desa sudah berjalan efektif yang mana penyaluran bantuan kepada masyarakat kurang mampu dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Diketahui berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa Aplikasi SIKS-NG dilakukan atas dasar Keputusan Peraturan Kementerian Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. untuk mempermudah dalam menyalurkan bantuan agar tepat sasaran. Dengan begitu, Menteri Sosial memberikan wewenang kepada Dinas Sosial di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Aplikasi SIKS-NG yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Denpasar namun dalam pendataan masyarakat kurang mampu Dinsos Kota Denpasar dibantu oleh Fasilitator Desa Pemecutan Kaja. Terkait masyarakat yang layak mendapatkan bantuan dari pemerintah di verifikasi oleh kementerian sosial RI setelah data masyarakat kurang mampu dikirim oleh dinsos Kota Denpasar ke Dinsos Provinsi Bali lalu dikirim ke kementrian sosial RI untuk di verifikasi. Kemudian pelaksanaan dari peraturan sudah dijelaskan bagaimana cara atau alur pelaksana dalam mengelola kegiatan pelaksanaan program. Dimana DINSOS menggunakan Standard Operational Procedure (SOP) untuk mengetahui bagaimana alur pendaftaran dan pelaksana melakukan aktivitasnya sesuai pada peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan petunjuk teknis dilakukan dengan strategi di lapangan dengan harapan program Aplikasi SIKS-NG berjalan dengan efisien serta efektif, dan rasional maupun realistis.

Namun pada kenyataan yang terjadi dilapangan bahwa pelaksanaan program Aplikasi SIKS-NG sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, sedangkan aktivitas pelaksana menggunakan Standard Operational Procedure (SOP) yang ditetapkan mengenai Layanan Aplikasi SIKS-NG untuk memudahkan menyalurkan bantuan dengan tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu. Berbeda dengan strategi yang digunakan Dinas Sosial Kota Denpasar dengan sensus penduduk yang dibantu oleh fasilitator desa, dimana pemerintah mengharapkan agar dapat menyalurkan bantuan kepada masyarakat kurang mampu tepat sasaran pemerintah mengharapkan cara yang efektif untuk memberikan bantuan sosial melalui Aplikasi SIKS-NG. Strategi dalam penerapan program SIKS-NG yaitu dengan cara sosialisasi yang diselenggarakan oleh DINSOS dan dengan melihat daerah atau wilayah seperti di Desa Pemecutan Kaja yang memiliki interaksi sosial yang masih tergolong bagus (tradisional) dengan memanfaatkan grup banjar pada aplikasi WhatsApp maka pemerintah memberikan informasi terkait Aplikasi SIKS-NG, siapa saja masyarakat yang menerima bantuan dan apa saja dokumen yang perlu disiapkan ketika ingin melakukan pendaftaran bagi masyarakat kurang mampu dan belum lolos menerima bantuan.

Berdasarkan Teori Kebijakan Publik pada Indikator Implementasi Program yaitu Interpretasi atau pemahaman pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sudah berjalan dengan baik namun memang perlu dimaksimalkan kembali terutama dalam sosialisasi yang diharapkan dapat lebih jelas kepada masyarakat agar masyarakat tidak kebingungan untuk memenuhi dokumen persyaratan saat melakukan pendaftaran program Aplikasi SIKS-NG. Karena beberapa masyarakat masih belum melengkapi persyaratan dokumen secara lengkap saat melakukan pendaftaran, serta kurang memperbarui data pada kartu keluarga. Hal tersebut menjadi hambatan bagi petugas dalam menginput data masyarakat kurang mampu.

3. Aplikasi

Suatu kebijakan akan berhasil apabila kebijakan tersebut dapat diaplikasikan atau diterapkan dengan harapan akan muncul respon dari target sasaran. Penerapan atau pengaplikasian suatu kebijakan dapat mengetahui bagaimana masyarakat sekitar dapat terima atau menolak implementasi serta output dari kebijakan tersebut. Pemerintah mencoba menerapkan suatu kebijakan tidaklah tindakan yang mudah, hal ini dapat menyebabkan tantangan yang harus dihadapi oleh implementator, baik itu dari aktivitas aplikasi serta penerima dari suatu kebijakan tersebut. Diketahui berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa implementasi program Aplikasi SIKS-NG dalam penyaluran bantuan pada Aplikasi SIKS-NG di Desa Pemecutan Kaja dalam indikator aplikasi atau penerapan sudah berhasil diaplikasikan atau diterapkan melalui Aplikasi SIKS-NG.

Dikatakan demikian karena hasil temuan peneliti bahwa masyarakat penerima manfaat pengguna aplikasi SIKS-NG sendiri dapat membantu perekonomian mereka dan biaya mendidikan anak-anak. Kemudian terkait dengan prosedur dan tata cara Pendaftaran dan penyaluran bantuan pada aplikasi SIKS-NG adanya SOP dalam melakukan proses pendaftaran masyarakat hingga masyarakat tersebut dinyatakan berhak dan memenuhi kriteria penerima bantuan.

Namun pada kenyataannya dalam mengelola data masyarakat tersebut pihak operator harus terus selalu update berita terkait kapan membuka pendaftaran dan ada kuota tersedia untuk lolos menerima bantuan agar masyarakat tidak ada yang keberatan (protes) jika ia sudah daftar berkali-kali tapi belum dinyatakan lolos dan ada juga masyarakat yang tidak mengetahui adanya program dari aplikasi SIKS-NG sehingga masyarakat tersebut datang langsung ke Dinas Sosial Kota Denpasar. Aplikasi SIKS-NG memiliki alur yaitu masyarakat melakukan pendaftaran hingga masyarakat tersebut terverifikasi membutuhkan waktu tiga bulan menurut SOP. Dan penyaluran bantuan setiap tiga bulan sekali, realitanya penyaluran bantuan sempat terlambat yang disebabkan oleh pemilu namun pada penyaluran berikutnya masyarakat tersebut mendapatkan double.

Berdasarkan Teori Kebijakan Publik pada Indikator Implementasi Program yaitu aplikasi atau penerapan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun aplikasi ini dirancang untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, seringkali terdapat ketidaksesuaian antara data penerima yang diusulkan oleh desa dengan data dari pusat. Serta penyaluran bantuan sempat terhambat

karena adanya pemilu. Untuk meningkatkan implementasi aplikasi SIKS-NG, disarankan agar dilakukan pemutakhiran data secara berkala untuk mengatasi ketidaksesuaian antara data penerima desa dan pusat. Selain itu, perlu diadakan sosialisasi dan pelatihan bagi operator ditingkat desa agar mereka lebih memahami penggunaan aplikasi. Untuk menghindari hambatan penyaluran bantuan akibat pemilu, penting untuk merencanakan jadwal penyaluran yang jelas dan melibatkan semua pihak dalam proses pengusulan bantuan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bantuan sosial dapat disalurkan dengan lebih tepat sasaran dan efisien.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai pelaksanaan program Aplikasi SIKS-NG dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin di Desa Pemecutan Kaja oleh Dinas Sosial Kota Denpasar yang didukung oleh fasilitator desa, dapat dikategorikan bahwa program ini telah berjalan dengan baik. Namun, pelaksanaannya belum mencapai tingkat optimal karena masih ditemukan sejumlah kendala yang dialami baik oleh masyarakat maupun pelaksana. Kesimpulan dari temuan ini adalah sebagai berikut:

1. Organisasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi program, termasuk program Aplikasi SIKS-NG di Dinas Sosial Kota Denpasar dan Desa Pemecutan Kaja. Sumber daya manusia yang memadai serta struktur organisasi yang jelas telah memberikan dukungan yang baik terhadap pelaksanaan program ini. Namun, metode sosialisasi yang digunakan masih belum optimal, sehingga sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami prosedur pendaftaran maupun manfaat dari program tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan sosialisasi yang lebih intensif dan rutin, disertai dengan pengawasan secara berkala agar program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
2. Pemahaman dan interpretasi yang baik dari semua pihak terkait menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program Aplikasi SIKS-NG di Desa Pemecutan Kaja. Program ini telah berjalan sesuai aturan dan SOP yang ditetapkan, dengan verifikasi data oleh Kementerian Sosial untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Namun, sosialisasi masih perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih paham tentang prosedur pendaftaran dan persyaratan dokumen, karena ketidaklengkapan data menjadi hambatan dalam penginputan dan penyaluran bantuan. Dengan perbaikan sosialisasi, pelaksanaan program diharapkan lebih efektif dan efisien.
3. Penerapan atau aplikasi program penyaluran bantuan melalui Aplikasi SIKS-NG oleh Dinas Sosial Kota Denpasar di Desa Pemecutan Kaja telah berhasil diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima, terutama dalam peningkatan ekonomi dan biaya pendidikan anak. Proses pendaftaran dan penyaluran bantuan berjalan sesuai SOP, meskipun terdapat kendala seperti ketidaksesuaian data antara desa dan pusat, kurangnya informasi kepada masyarakat, serta keterlambatan penyaluran akibat faktor eksternal seperti pemilu. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan pemutakhiran data secara berkala, peningkatan sosialisasi dan pelatihan bagi operator desa, serta perencanaan jadwal penyaluran yang lebih baik. Dengan langkah-langkah ini, implementasi aplikasi SIKS-NG diharapkan menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran sehingga manfaat bantuan sosial dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat yang membutuhkan.

Saran

Dilihat dari hasil temuan yang peneliti temukan di lapangan terkait implementasi program Aplikasi SIKS-NG dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat kurang mampu agar tepat sasaran, ada beberapa rekomendasi yang dapat penulis berikan guna meningkatkan penyelenggaraan program Aplikasi SIKS-NG. Adapun rekomendasi atau saran tersebut, yaitu:

1. Berikan pelatihan berkala kepada operator desa dan fasilitator agar mereka lebih kompeten dalam mengelola aplikasi, menginput data dengan akurat, serta mampu memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat. Penyediaan pelatihan yang berkelanjutan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi akan meningkatkan kompetensi dalam mengoperasikan sistem secara optimal dan mengurangi kesalahan penginputan data.
2. Tingkatkan koordinasi dan sinkronisasi data antara Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) secara berkala. Serta perangkat desa aktif menghimbau masyarakat yang mengalami perubahan pada kartu keluarga seperti ada kematian atau perubahan status pekerjaan. Pengembangan sistem integrasi data otomatis dan verifikasi berkala dapat membantu memastikan data yang digunakan dalam SIKS-NG selalu terbaru dan akurat, sehingga meminimalisir penolakan data oleh sistem.
3. Meningkatkan dan mengencangkan sosialisasi yang lebih efektif dan efisien. Misalnya, dengan memasang pamflet terkait persyaratan dan alur program di setiap banjar, sosialisasi melalui media sosial seperti instagram dan facebook sebagai media yang sering dikunjungi serta digunakan oleh masyarakat di segala usia, dan sosialisasi menggunakan video yang menarik dan ditayangkan di setiap banjar atau media sosial lainnya.

Dengan penerapan saran-saran tersebut, diharapkan program Aplikasi SIKS-NG dapat berjalan lebih optimal dan manfaat bantuan sosial dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat yang membutuhkan.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Akbar, M. F., Sakbir, S., Malipi, S., & Sahi, N. A. (2023). *Implementation of Social Welfare (DTKS) Integrated Data Program through the Next Generation Social Welfare Information System (SIKS NG)*. International Journal Papier Public Review, 4(2), 29-41.
- Andriani, Y. (2021). *Efektivitas Program Pemuktahiran Data Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation (SIKS-NG) Di Kabupaten Bengkulu Selatan (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia)*.
- Andriyansah, D. (2022). *Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung*. JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 6(3).
- Bali, B. P. S. P. (2023). *Jumlah Penduduk miskin Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota - Tabel statistik*. Retrieved from <https://bali.bps.go.id/indicator/23/261/1/jumlah-penduduk-miskin-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html>
- Bashori, I., Sihombing, T., & Amin, M. (2023). *Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang*. Histeria Jurnal: Ilmiah Soshum Dan Humaniora, 2(1), 1-12.
- Darmadi, H. (2011). *Metode penelitian pendidikan*. Alfabeta: Bandung
- Dunn, William N. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Gaghauna, V. G., Safar, M. M., & Wahab, A. (2022). *Optimasi SIKS-NG di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah*. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 3(09), 1286-1293.
- Gobel, U. T., Katili, M. R., & Polin, M. (2022). *Evaluasi Tingkat Kepuasan Pengguna SIKS-NG Menggunakan Metode EUCS Di Kabupaten Bone Bolango*. Diffusion: Journal of Systems and Information Technology, 2(2), 13-19.

- Harliana, H., Subana, S., Setyawan, D. A., Fauzan, A. C., Huda, M. M., Bhakti, R. M. H., & Prabowo, T. (2022). *Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIKS-NG Dalam Mendata Penerima Bantuan Sosial Di Desa Kandungan*. JAMU: Jurnal Abdi Masyarakat UMUS, 3(01), 1-8.
- Humas. (2019). *Melalui Aplikasi SIKS-NG, Kemensos Siapkan Data Kemiskinan Yang Akurat dan Aktual*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/melalui-aplikasi-siks-ng-kemensos-siapkan-data-kemiskinan-yang-akurat-dan-aktual/>
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Moleong, L. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
- Permatasari, I. A. (2020). *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)*. The Journalish: Social and Government, 1(1), 33-37.
- Purwanti, E. H. (2023). *Penerapan E-Government Pada Aplikasi SIKS-NG di Desa Sihiong Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba*. PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies, 4(1), 91-103.
- Ratnasari, I., Ramadan, E., Nurlatifah, I., Ginanjar, S. E., & Santa, R. (2024). *Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Untuk Pengajuan DTKS*. Jurnal Sosial Teknologi, 4(2), 109-115.
- Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press
- Tachjan, Dr. H, M.Si. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial.
- Wati, S. A., Wahab, A., & Alfian, A. (2022). *Efektivitas Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-Ng) dalam Mendukung Program SLRT dan Puskesmas Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan*. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 3(09), 1294-1305.
- Winamo, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press (Anggota IKAPI).